BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan atau agency relationship ketika satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk bertindak atas namanya untuk melakukan tindakan yang berazaskan prinsip dan memberi kuasa kepada agen dalam membuat keputusan terbaik bagi principal. Teori agency ini merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada agents yang dikarenakan ia tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri untuk melakukan semua kegiatan sesuai kontrak kerja. Teori ini menekankan bahwa pentingnya pemisahaan kepemilikan (pemegang saham) dari pengelolaan perusahaan kepada para tenaga ahli (agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari–hari.

Dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan mempunyai tujuan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga–tenaga ahli. Jika kedua belah pihak

tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, dapat diyakini agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Dengan demikian didalam satu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. Teori keagenan ini diharapkan rasa percaya kepada para investor bahwa para investor nantinya akan menerima return sesuai dengan dana yang mereka keluarkan untuk melakukan investasi (Rimardhani,2016).

Salah satu cara untuk memahami GCG ialah dengan mengerti teori agensi (theory agency) terlebih dahulu. Teori Agency merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori ini bersumber dari teori ekonomi, keputusan, sosiologi dan organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi), yaitu manajer. Hubungan agency ini dapat mengarah pada kondisi ketidak seimbangan informasi (asymmetrical information) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dengan adanya kondisi ini agents yang ada di perusahaan dapat melakukan kecurangan angka–angka dalam akuntansi yang telah disajikan dalam bentuk laporan keuangan dengan cara melakukan praktik manajemen laba.

Untuk mengurangi dampak hal tersebut dapat menggunakan cara seperti, corporate governance. Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance adalah: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), dan responsibilitas (responsibility). Corporate governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada akhirnya diharapkan dapat meminimalkan tindakan manajemen laba. Dalam perkembangan selanjutnya teori ini mendapatkan perhatian yang lebih karena dapat mencerminkan kenyataan yang ada di dalam suatu perusahaan. Berbagai teori mengenai Corporate Governance terus berkembang dengan bertumpu pada Agency Theory yang mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009).

2.1.2 Pengertian dan Konsep Good Corporate Governance

2.1.2.1 Corporate Governance

Isu mengenai Good *Corporate Governance* (GCG) telah mengemuka beberapa tahun belakangan ini, Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 yang dikenal sebagai *Cadburry Report*. Komite Cadburry mengemukakan bahwa GCG menjadi suatu prinsip yang dibuat untuk mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar terus menyeimbangkan

antara kekuatan dan kewenangan perusahaan di dalam memberikan tugas kepada shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Iklim perubahan lingkungan usaha yang sangat cepat dan banyaknya permasalahan yang timbul dalam dunia usaha menuntut perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik di dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) 2011, *Good Corporate Governance* adalah:

" Seperangkat peraturan yang mengatur semua hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, para kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak serta kewajiban mereka".

Berdasarkan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) corporate governance* (2004) sebagai berikut:

"Corporate governance is the system by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholder, and spells out the rule and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance".

Berdasarkan pengertian di atas Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai suatu sistem dan peraturan yang mana di dalamnya mengatur serta melindungi hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi dan pemerintah dalam menentukan tujuan perusahaan, meningkatkan laba perusahaan, serta perlindungan dan pengendalian perusahaan. Dengan demikian penerapan corporate governance yang di dalamnya terdapat peraturan dan hukum yang penting untuk dilaksanakan dan diterapkan pada suatu bisnis dapat memunculkan tingkat kepercayaan yang lebih antara satu pihak dengan pihak yang lainnya serta nilai ekonomi yang baik bagi perusahaan.

2.1.2.2 Struktur Good Corporate Governance

Struktur dari Good Corporate Governance sangat perlu diperhatikan agar dapat dengan mudah dalam pelaksanaannya. Terdapat dua pola struktur corporate governance yang digunakan dalam mengelola perusahaan, yaitu:

a. One Tier System

One Tier System juga disebut sebagai sistem satu tingkat (Single Board System). Sistem ini digunakan oleh negara Anglo-Saxon seperi Amerika dan Inggris. Dalam sistem satu tingkat, peran dewan komisaris dan dewan direksi dijadikan dalam satu wadah, yang disebut dengan Board of Director. Dewan direksi terdiri dari direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif.

b. Two Tier System

Two Tier System disebut juga Sistem Dua Tingkat yang berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Sedangkan dewan komisaris bertugas mengawasi tugas-tugas dewan direksi.

Indonesia dalam hal ini menganut Two Tier system, hal ini terjadi karena adanya pengaruh Belanda yang juga menganut sistem tersebut. Akan tetapi di Indonesia yang menganut sistem two-tier system ala Eropa tidak menempatkan wakil dari karyawan (employe) pada level dewan direksi. Hal ini yang tidak diterapkan di Indonesia, jika diterapkan hal ini dapat memberikan efek yang baik bagi nasib karyawan di suatu perusahaan.

2.1.2.3 Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip–prinsip Good Corporate Governance juga tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002. Prinsip – prinsip tersebut meliputi:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip ini mengandung unsur pengungkapan (disclosure), dan diartikan sebagai terbukanya informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan pasar modal Indonesia yang dimaksud dengan

informasi material dan relevan adalah infromasi yang dapat mempengaruhi naik turunya saham pada suatu perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi struktur, sistem dan pertanggung jawaban dalam suatu organisasi sehingga pengelolaan perusahaan agar terlaksana secara efektif dan ekonomis. Dengan mewujudkan pelaporan keuangan tepat waktu, mengembangkan komite audit dan risiko dalam upaya mengdukung secara penuh fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, terus mengembangkan kembali peran dan fungsi internal.

3. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini dapat diartikan sebagai perlakuan adil dan kesetaraan di dalam memenuhi hak–hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness ini mencakup hak pemodal, sistem hukum serta penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor yang khususnya pemegang saham minoritas.

4. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip korporasi yang sehat.

5. Pertanggung Jawaban (*responsibility*)

Prinsip ini dapat diartikan sebagai kesesuaian kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh adalah Corporate Social Responsibility (CSR), seperti pemberian beasiswa kepada para pelajar yang kurang mampu.

Prinsip-prinsip diatas merupakan point penting dari terciptanya Good Corporate Governance yang harus di capai oleh perusahaan. Untuk mencapai ini semua harus adanya kerja sama antar semua pihak baik dari nternal ataupun ekternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Serta dapat memberikan manfaat yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.1.2.4 Manfaat Good Corporate Governance

Menurut *Dwiridotjahjono (2010), Good Corporate Governance* memiliki manfaat yang dapat diperoleh dalam penerapannya, seperti:

a. Penerapan praktik *good corporate governance* (GCG) suatu perusahaan dapat mengurangi agency cost, dimana terdapat biaya yang timbul dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.
b. Perusahaan dapat mengurangi Cost Of Capital, dimana biaya modal yang harus di tanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara

baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.

c. Pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik yang dapat menghasilkan keputusan yang optimal, sehingga terciptanya budaya kerja yang lebih baik.

d. Good corporate governance dapat meminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

e. Nilai perusahaan di mata investor cenderung meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk keperluan perusahaan.

f. Para pemegang saham, beranggapan peningkatan kinerja dengan sendirinya dapat menaikkan nilai saham serta nilai deviden yang akan mereka terima dari suatu perusahaan. Hal ini juga dapat menguntungkan negara dalam sektor pajak. Peningkatan kinerja juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba.

g. Praktik good corporate governance karyawan diposisikan sebagai salah satu stakeholder yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan dimana nantinya motivasi dan kepuasan akan meningkat dari para karyawan. Maka dari itu secara otomatis dapat meningkatkan tingkta

produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan.

h. Pelaksanaan good corporate governance, maka tingkat kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan semakin meningkat dan citra positif perusahaan akan terus meningkat di setiap waktunya.

i. Penerapan good corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen cenderung tidak melakukan kecurangan dalam bentuk rekayasa terhadap laporang keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian yang transparan.

2.1.2.5 Penerapan Good Corporate Governance

Keberhasilan penerapan Good Corporate Governance juga mempunyai prasyarat tersendiri. Menurut Daniri (2005) ada dua faktor yang memegang peranan, yaitu:

1. Faktor Eksternal yaitu beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, seperti:

   a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.

b) Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.

c) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan).

d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi secara sukarela.

e) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan praktik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan maslaah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

2. Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan.Beberapa faktor seperti:

a) Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.

c) Manajemen pengendalian risiko perusahaam juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.

d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.2.6 Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu aturan yang menjelaskan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dan pihak yang melakukan kontrol serta pengawasan terhadap keputusan yang dibuat tersebut. Salah satu fungsi dari mekanisme ini dipercaya dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pihak pengelola terhadap investor. Konflik ini membuat pihak principal harus melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan tujuan meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Variabel corporate governance diukur melalui sebuah mekanisme, mekansime ini merupakan sebuah syarat dalam melakukan sistem di suatu perusahaan. Mekanisme ini dibagi menjadi dua, yaitu: internal dan eksternal. Mekanisme internal seperti dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, sedangkan mekanisme eksternal lebih pada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada

perusahaan tersebut dan juga dalam system hukum yang berlaku (Dennis dan McConnell dalam Ferry 2010).

2.1.2.7 Dewan Direksi (*Board of Directors*)

Menurut *Pasal 1 dalam UUPT No. 40*, Dewan Direksi adalah:

"Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komiaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola sumber daya dalam perusahaan.

Dewan direksi dalam menjalankan perseroan memiliki tugas–tugas, yaitu:

1. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan.
2. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku, anggaran dasar dan keputusan RUPS (Rapat Umum

Pemegang Saham) dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku anggaran dasar, keputusan RUPS serta peraturan yang telah ditetapkan perseroan.

3. Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata–mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan.
4. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu direksi mengembangkan sistem pengendalian dan sistem manajemen risiko secara struktural dan komprehensif.
5. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kegiatan operasional dan kepengurusan dalam melaksanakan kepentingan serta pencapaian tujuan perusahaan. Selain bertanggung jawab di dalam internal perusahaan Dewan Direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator, dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perushaaan dan dana dari para investor.

2.1.2.8 Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*)

Menurut *Egon Zehnder* (2000) dalam Fcgi Boklet (2006), dewan komisaris adalah:

"Dewan komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabiltas. Dewan komisaris merupakan suatu sistem mengawasi mekanisme perusahaan serta menjadi pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan".

Menurut *UU No. 40 Tahun 2007* tentang Perseroan Terbatas, Dewan komisaris adalah:

"Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran serta memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance".

Dewan komisaris mempunyai fungsi kontrol yang menjadi salah satu bentuk praktis dari penerapan teori agensi. Seluruh tugas dewan komisaris tersebut biasanya tertuang didalam anggaran dasar perusahaan. Fungsi utama dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Posisi dewan komisaris juga sangat penting dalam menjembatani kepentingan principal dalam sebuah perusahaan. Dengan semakin banyaknya dewan komisaris pengawasan

terhadap dewan direksi akan jauh lebih baik, masukan yang didapat direksi akan jauh lebih banyak (Sukandar.P.D dan Rahardja, 2014).

Di Indonesia dewan komisaris diangkat dan diberhentikan atas persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka diangkat dalam suatu periode tertentu dan memungkinkan diangkat kembali. Praktek dewan komisaris sangat bergantung pada lingkungan perusahaan, di dalam beberapa kasus dewan komisaris dinilai tidak melakukan tugas sebagai pengawas perusahaan dengan baik dan seringkali tidak memiliki manfaat. Dewan ini juga menjembatani kepentingan principal dan manajer perusahaan.

2.1.2.9 Komite Audit (*Audit Committee*)

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris perusahaan melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi selain melaksanakan pengelolaan perusahaan dan lebih penting lagi melaksanakan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Menurut *Ikatan Komite Audit Indonesia* (2014), komite audit adalah:

"Komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam

menjalankan fungsi pegawasan atas proses pelaporan keuangan manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi corporate governance di perusahaan–perusahaan".

Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) dan YPPMI institut, yang dikutip oleh Suryana et al. (2006), para Komite audit memiliki tanggung jawab di tiga bidang di dalam perusahaan, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Komite audit memiliki tanggung jawab pada perusahaan untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenar-benarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Komite audit bertanggung jawab pada perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan telah menajalankan tata kelola perusahaan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab pada perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang

berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Menurut *surat edaran BAPEPAM SE-03/PM/2013*, mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit maupun ekstenal audit.
4. Mengidentifikasi hal–hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Komite audit merupakan organ yang dibentuk oleh dewan komisaris atau dewan pengawas, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota yang dipimpin oleh seorang komisaris independen. Masa jabatan komite audit perlu dibatasi, misalnya maksimal tiga periode masa jabatan disuatu perusahaan dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali.

Para komite audit memiliki peranan dalam membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas pada laporan keuangan, menciptakan tingkat kedisiplinan serta melakukan pengendalian untuk mengurangi kesempatan penyimpangan dalam upaya pengelolaan perusahaan, peningkatan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal

audit dalam pengidentifikasian hal-hal yang memerlukan perhatian khusus oleh para dewan komisaris (Alijoyo, 2004).

2.1.3 Gambaran Sektor Industri Pertambangan

Industri pertambangan merupakan sektor industri yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Ada beberapa sektor dalam industri pertambangan, antara lain: batu bara, emas, minyak dan gas bumi, logam dan mineral, serta batu-batuan lainnya. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam tambang. Potensi pada bahan galian batubara menduduki peringkat ketiga untuk pengekspor batubara, diikuti produksi timah, tembaga, serta emas. Dengan melimpahnya kekayaan alam indonesia membuat kalangan pelaku dunia pertambangan semakin percaya untuk berinvestasi di Indonesia (Asosiasi Pertambangan Indonesia: 2014).

Industri ini juga memberikan sumbangan yang cukup banyak untuk negara seperti: meningkatkan pendapatan ekspor, membuka lapangan pekerjaan, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, sumber pemasukan bagi pemerintah pusat serta daerah. Dalam beberapa tahun belakangan ini industri minyak dan tambang mengalami penurunan yang cukup pesat hal ini tercermin pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada kuartal tiga tahun 2013 yang dikarenakan beberapa faktor seperti: harga komoditi pertambangan mengalami penurunan yang cukup tajam, minimnya

permintaan impor batubara dari pasar global yang berakibat anjloknya ekspor mineral dan batubara, dan juga banyak negara lain sudah meninggalkan batubara sebagai sumber energi karna dianggap sebagai penyumbang emisi yang terbesar.

Pada tahun 2011-2016 industri ini mengalami penurunan yang cukup tajam, tahun 2015 menjadi tahun yang cukup berat bagi para pelaku industri pertambangan. Setelah beberapa tahun sebelumnya industri ini mengalami penurunan kinerja keuangan dan terlebih karna turunnya permintaan dari pasar china yang menjadi salah satu tujuan pasar pertambangan indoneisa dan juga jatuhnya harga komoditas. Sehingga membuat perusahaan tidak mendapatkan profit yang di harapkan. Hal ini menyulitkan dan membuat para pelaku dunia pertambangan harus memutar otak agar perusahaan tetap berjalan baik yang salah satunya membuat keputusan berat dengan mengurangi jumlah karyawan perusahaan.

Pada pertengahan 2016 mengalami peningkatan sehingga memberikan angin segar kepada pelaku idnustri pertambangan. Peningkatan in juga dipicu oleh meningkatnya harga minyak dunia yang semakin merangkak naik ke harga normal. Setelah mengalami pasang surut pada pertangan tahun 2016 industri ini termasuk dalam penyumbang terbesar Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sumber dalam alam. Yang mana didalamnya terdapat batubara, minyak, mineral dan gas bumi yang mencapai 95% dari total pendapatan sumber daya alam. Sektor ini pun

masuk dalam kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB) setelah pertanian, jasa kontruksi, dan juga perdangan pada tahun 2016.

Pemilihan sektor pertambangan sebagai objek penelitian ini karena industri pertambangan masih menjadi salah satu sektor utama penggerak kegiatan perekomomian di Indonesia. Dunia pertambangan memegang peranan penting karena jumlah penduduk yang berberprofesi di sektor pertambangan mencapai 1,6 juta orang dengan kontribusi sebesar 11,78 % terhadap GDP Indonesia. Perusahaan pertambangan diharapkan mampu dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan melimpahnya hasil bumi Indonesia dapat menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan pertambangan yang etrdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan dengan adanya pasang surut dalam perusahaan pertambangan, pihak internal perusahaan diharapkan dapat terus mempertahankan dan terus mengoptimalkan profitabilitas perusahaan agar perusahaan tetap terus bertahan dari efek penurunan harga komoditas tambang.

2.1.4 Kinerja Perusahaan (*Company Performace*)

Menurut *Moeheriono* (2010:60), kinerja adalah:

"Suatu tingkat pencapaian dalam usaha pelaksanaan program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategik suatu organisasi".

Menurut *Zarkasyi (2008:48) dalam Nofitasari, dkk (2015),* Kinerja perusahaan adalah:

"Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan".

Kinerja perusahaan dapat diartikan sebagai gambaran suatu kondisi perusahaan yang di dalamnya terdapat kondisi keuangan serta hal–hal yang telah dicapai oleh perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus akan terjamin masa depannya. Karena, mendapat kepercayaan yang lebih dari para investor, sehingga investor tidak merasa khawatir untuk berinvestasi di perusahaan. Untuk mengetahui kinerja perusahaan dapat dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode ataupun variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan.

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengukuran kinerja perusahaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi kewajiban kepada para pemegang saham serta tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja ini memiliki arti penting untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan.

2.1.5 Sistem Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola ataupun hasil dari pekerjaan para karyawan, maka dilakukan pengukuran kinerja yang dapat berupa pengukuran keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan beberapa ukuran, dimana sekumpulan ukuran tersebut meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan mengemukakan pendapat, pengambilan keputusan, perencanaan kerja dan daerah organisasi kerja.

Terdapat tiga kriteria yang lebih sederhana mengenai ukuran kinerja. Pertama, kuantitas kerja, yaitu jumlah yang harus dikerjakan, kedua kualitas kerja secara mutu yang dihasilkan, dan ketiga ketepatan waktu yaitu kesesuaian dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja perusahaan ditinjau dari perspektif keuangan memiliki tipikal dihubungkan dengan profitabilitas. Pengukuran kinerja dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan berbagai alat ukur termasuk rasio profitabilitas. Rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya yang di hitung dari besar laba yang dapat diperoleh (Rimardhani, dkk 2016). Penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator untuk mengukur kinerja perusahaan.

2.1.5.1 Return On Asset (ROA)

Rasio keuangan merupakan sebuah alat analisis keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja suatu perusahaan untuk membandingkan angka–angka yang terdapat di dalam

sebuah laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Salah satu rasio keuangan adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Rasio keuntungan ini dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu: GPM (Gross Profit Margin), Profit margin, NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity), ROI (Return On Investment), EPS (Earning Per Share).

Menurut *Kasmir (2012:201)*, Return On Asset adalah:

"Rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA juga dapat memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan. Karena, menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan".

Return On Asset sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan cara melakukan pembagian laba bersih setelah pajak dengan total aktiva setelah pajak dengan total aktiva dan ditampilkan dalam bentuk persentase. Semakin besar nilai ROA ke arah positif, menunjukkan kinerja perusahan semakin baik, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Sebaliknya, jika nilai ROA rendah ke arah negatif, maka

tingkat pengembalian dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasi mendapatkan kerugian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Mitton (2000) dengan judul penelitian A cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial crisis hasil dari penelitian tersebut ialah variabel-variabel yang berkaitan dengan corporate governance mempunyai dampak yang kuat terhadap kinerja perusahaan selama periode krisis di Asia Timur (tahun 1997 sampai dengan tahun 1998). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 398 perusahaan di kawasan asia yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Korea, Filiphina, dan Thailand. Hasil dari penelitian ini ialah perusahaan dengan kualitas pengungkapan yang lebih baik merupakan perusahaan kepemilikan dari Thailand. Perusahaan dengan kualitas pengungkapan yang lebih baik, kepemilikan pihak eksternal yang lebih terkonsentrasi, dan perusahaan yang lebih terfokus (dibandingkan dengan yang terdiversifikasi) memiliki kinerja pasar yang lebih baik.

Yasser, Q.R et al. (2011) melakukan pengujian terhadap mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Pengujian ini berjudul, Penelitian Corporate governance and firm performance in Pakistan: The case of Karachi Stock Exchange (KSE)-30. Sampel penelitian ini terdiri dari 30 perusahaan Pakistan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange-30 (KSE) -30 periode 2008-2009. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa dewan direksi, komposisi dewan, dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sedangkan komposisi dewan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Siti Muntiah (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Mekanisme Corporate Governnce terhadap Kinerja Perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE) yang ditunjukkan oleh pengungkapan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris ukuran, proporsi dewan independen komisaris, dan komite audit di Indonesia Stock Bertukar. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara simultan dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris ukuran, proporsi dewan independen komisaris dan komite audit yang telah positif mempengaruhi pada (2) kepemilikan institusional keuangan perusahaan ini telah mempengaruhi secara positif pada kinerja perusahaan (3) kepemilikan manajerial ini telah mempengaruhi negatif pada kinerja perusahaan (4) dewan komisaris mempengaruhi secara negatif pada kinerja perusahaan (5) proporsi kinerja perusahaan keuangan untuk dewan independen komisaris telah mempengaruhi secara positif pada kinerja perusahaan keuangan ini (6) dan panitia audit yang memiliki pengaruh positif pada kinerja perusahaan keuangan ini.

Arsanto Teguh Utomo dan Rahardjo (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme Corporate Governnce terhadap kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi liniear berganda serta analisis deskriptif, analisis regresi berganda digunakan untuk melakukan pengujian mekanisme tata kelola perusahaan yang baik yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan, komite audit dan kualitas audit terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependenya menggunakan ROA untuk menganalisis kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, ukuran dewan dan direktur independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sementara kepemilikan manajerial dan ukuran papan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Primayoga dan Basuki (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perdagangan dan Jasa). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang termasuk dalam perusahaan dagang dan jasa pada tahun 2009-2011. Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE, artinya apabila jumlah dewan komisaris independen dibagi jumlah dewan komisaris memiliki rasio yang besar maka kinerja perusahaan cenderung menurun. Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE, artinya perbandingan jumlah komite audit yang berasal

dari luar perusahaan dengan jumlah komite audit yang besar maka kinerja perusahaan cenderung menurun. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE, artinya jika jumlah aset yang dimiliki perusahaan semakin besar maka kinerja perusahaan semakin meningkat.

Mirna Dianita (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance (CG) terhadap kinerja keuangan perbankan. Hasil penelitian menemukan mekunisme CG secara simultan berpengaruh terhadap rasio NPL, KPMM, dan ROA. Secara parsial, kepemilikan manajerial dan proporsi outside directors menunjukkan pengaruh negatif terhadap rasio JJPL dan ROA, sedangkan jumlah BOD berpengaruh negative terhadap rasio LDR.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah anggota dewan direksi umumnya berhubungan dengan implikasi kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direksi yang bertugas sebagai pengendali internal utama untuk memonitor para manajer perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dalton et al. (1999) mengungkapan adanya hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang

besar tidak dapat melakukaan tindakan koordinasi, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang lebih kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki jumlah ukuran dewan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi yang lebih sedikit.

Penelitian Sinaga (2014), menyatakan terdapat pengaruh positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan. Proporsi dewan direksi ini sangat berperan dalam perhitungan kinerja perusahaan serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah agensi dalam perusahaan. Semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat yaitu:

H1: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran serta memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan GCG. Selain itu, Dewan komisaris juga mempunyai fungsi kontrol yang baik akan menjadi salah satu cara praktis dari penerapan teori agensi. Widiawati (2013) melakukan penelitian dengan salah satu variabel penelitiannya adalah ukuran dewan komisaris yang menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja

perusahaan. Hasil penelitian Widiawati menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang semakin banyak maka akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena ukuran dewan komisaris yang semakin banyak dilakukan akan meningkatkan tingkat pengawasan oleh dewan komisaris terhadap manajer.

Penelitian Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah dari anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah dalam mengendalikan serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap CEO, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan ke arah lebih baik. Dewan komisaris ialah salah satu fungsi kontrol dalam perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang besar akan jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan ukuran dewan komisaris yang jauh lebih kecil. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat yaitu:

H2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris perusahaan melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi selain melaksanakan pengelolaan perusahaan dan yang lebih penting lagi melaksanakan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Yasser,et al. (2011) menyimpulkan komite audit berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan.

Komite audit yang berasal dari luar perusahaan dianggap mampu melidungi kepentingan para pemegang saham dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit yang berada di dalam perusahaan ialah sebagai salah satu mekanisme corporate governance yang mampu untuk mengurangi tindakan manipulasi laba yang kerap dilakukan oleh pihak manajemen.

Nuryanah (2004) dalam Effendi (2005) melakukan penelitian bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Namun Effendi (2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian suatu perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat yaitu:

H3: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam suatu perusahaan pertambangan menggunakan dua variable. Pertama, variabel independen (variabel bebas) yaitu dewan direksi, dewan komisaris, komite audit. Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return On Asset untuk mengukur kinerja perusahaan, yang dimana Return On Asset ini termasuk di dalam rasio profitabilitas.

Gambar 2.1
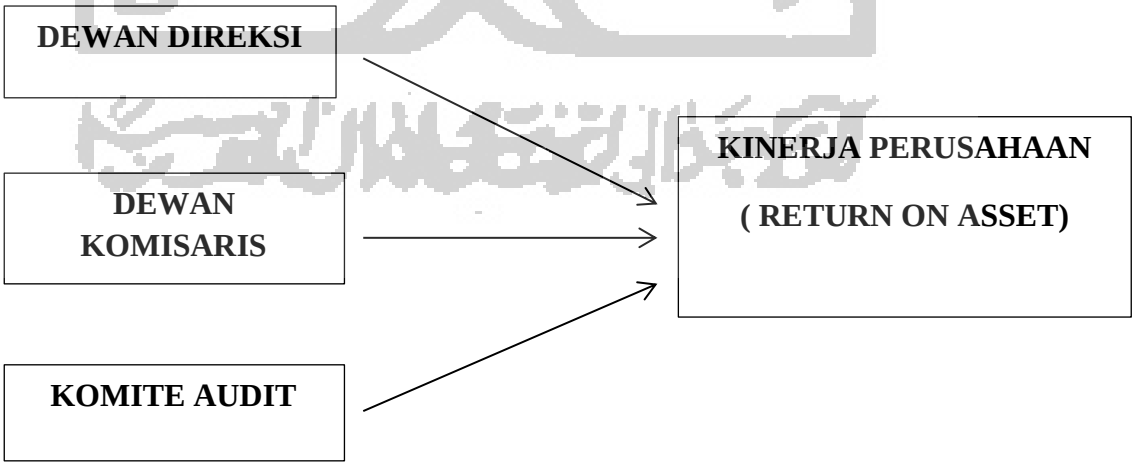
Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia 2012 – 2017